

Strategi Pergeseran Satuan Kecabangan Perbekalan dan Angkutan (Bekang) TNI AD Dalam Rangka Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Maluku

Hatorangan Efendy Situmeang¹ Sunarko² Rudi Lazuardi³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: situmeangtorang158@gmail.com¹ sunarko_mirpur@yahoo.com²
rudilazu209@gmail.com³

Abstrak

Satuan Kecabangan Pembekalan dan Angkutan (Bekang) TNI Angkatan Darat dalam mendukung penugasan pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku menghadapi kompleksitas tantangan mobilitas dan dukungan logistik. Karakteristik wilayah daerah kepulauan yang luas, terfragmentasi, dan memiliki tingkat kerawanan keamanan yang fluktuatif di Maluku, menuntut adanya strategi pergeseran satuan Bekang yang mampu menjamin ketepatan waktu, efektivitas distribusi logistik, serta keberlangsungan dukungan operasi pengamanan. Namun demikian, keterbatasan sarana transportasi laut dan udara, kondisi infrastruktur yang belum merata, serta kendala koordinasi lintas sektor menyebabkan proses pergeseran satuan Bekang sering menghadapi hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kerawanan keamanan dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas pergeseran satuan Kecabangan Bekang TNI AD, serta merumuskan strategi pergeseran yang efektif, efisien, dan adaptif mendukung penugasan pengamanan daerah rawan. Metode kualitatif dengan desain studi kasus dan data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pergeseran satuan Kecabangan Bekang TNI AD dalam mendukung pengamanan daerah rawan Maluku dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu 1) koordinasi antarlembaga yang belum optimal; 2) keterbatasan rantai pasok logistik; 3) minimnya infrastruktur pendukung; 4) belum terintegrasinya kerja sama sipil-militer secara berkelanjutan, serta 5) dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Maka, strategi pergeseran satuan Bekang yang efektif dan adaptif melalui penerapan Model Pergeseran Gabungan, yaitu dengan memanfaatkan intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan, membangun pangkalan aju logistik di pulau-pulau strategis, serta menerapkan sistem rotasi dan distribusi logistik berdasarkan analisis risiko yang terus diperbarui. Implementasi strategi ini memerlukan dukungan alutsista transportasi yang memadai, penguatan infrastruktur logistik modern, dan sistem informasi terintegrasi guna mewujudkan kesiapan operasional satuan Kecabangan Bekang TNI AD yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan strategis di wilayah kepulauan.

Kata Kunci: Strategi Pergeseran Satuan, Kecabangan Bekang TNI AD, Dukungan Logistik dan Pengamanan Daerah Rawan Maluku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam lanskap keamanan global kontemporer, ancaman bersifat hybrid di mana disintegrasi sosial dan konflik internal sering menjadi pintu masuk bagi instabilitas kawasan. Di tingkat regional, kawasan Indo-Pasifik yang dinamis menuntut konsolidasi keamanan domestik yang kokoh. Secara nasional, stabilitas keamanan di wilayah kepulauan Indonesia menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Namun, tantangan utama yang dihadapi TNI AD saat ini adalah memastikan proyeksi kekuatan (power projection) yang cepat di tengah geografi maritim yang luas, sesuai dengan mandat menjaga keutuhan wilayah dari ancaman non-tradisional. Wilayah Maluku, dikenal sebagai Spice

Islands, dengan konstelasi geografis kepulauan ekstrem, yakni 92,4% wilayahnya merupakan perairan (BPS Provinsi Maluku 2023). Karakteristik fragmentasi geografis ini menciptakan tantangan logistik yang unik bagi TNI AD (Van Klinken, 2007) serta residual konflik pasca-sektarian meninggalkan kerawanan laten berupa trauma sosial yang sewaktu-waktu dapat memicu eskalasi (Al Qurtuby, 2012). Maka, kehadiran satuan penugasan di titik-titik rawan bukan sekadar kebutuhan taktis, melainkan kebutuhan sosial-politis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mencakup bantuan pengamanan daerah rawan. Dalam konteks ini, Kecabangan Pembekalan Angkutan (Bekang) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung mobilitas. Sesuai doktrin Mabesad (2020), tugas pokok TNI AD dalam hal ini adalah menyelenggarakan dukungan logistik yang proaktif-modular dan mandiri untuk memastikan readiness pasukan di pulau-pulau terluar, yang sejalan dengan prinsip bahwa dalam pertahanan kepulauan, "logistik adalah elemen yang menentukan keberhasilan operasional" (Lemhannas RI 2019, 112). Secara factual (das sein), efektivitas pergeseran satuan menghadapi kendala sistemik dalam lima dimensi: 1) Koordinasi Antar Lembaga: Integrasi operasional dengan otoritas transportasi laut (seperti PT PELNI atau ASDP) belum optimal, sehingga pergeseran sering tertunda oleh jadwal komersial (Mabesad 2020); 2) Rantai Pasok Logistik: Lead Time pemenuhan kebutuhan pokok melampaui ambang batas operasional karena terputusnya rantai pasok ke pos-pos terpencil; 3) Minim Infrastruktur: Ketiadaan staging area dan dermaga khusus militer memaksakan ketergantungan pada fasilitas sipil yang tidak memadai untuk Alat Peralatan Militer (Alpalmat) berat; 4) Integrasi Sipil-Militer: Kesenjangan dalam Civil-Military Cooperation (CIMIC) menyebabkan dukungan sumber daya wilayah belum terutilisasi secara efisien; dan 5) Dinamika Sosial Budaya: Kurangnya pemahaman terhadap lanskap sosial dalam jalur distribusi sering memicu hambatan sosial saat pergeseran berlangsung (Rahakbauw, 2020).

Idealnya (das sollen), tercipta mekanisme pergeseran yang responsif, berorientasi risiko, dan berbasis data spasial-temporal. Berdasarkan pemikiran Jati (2015), efektivitas militer di wilayah kepulauan sangat ditentukan oleh integrasi logistik yang adaptif terhadap geographical constraint, yang didukung oleh sinergi lintas sektor yang mulus antara TNI AD, Polri, dan pemangku kepentingan daerah. Pramono (2017; 2019) mengatakan bahwa model pergeseran reaktif kini masih bersifat kaku dan sering terlambat karena hambatan birokrasi dan intelijen. Sejalan dengan pendapat tersebut, Taufiq (2019) menegaskan bahwa ketiadaan respons cepat pada daerah pasca-konflik berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa celah (gap) dapat diminimalisir dengan menggunakan solusi pergeseran satuan TNI AD, khususnya satuan kecabangan Bekang TNI AD yang lebih spesifik pada integrasi logistik multimoda sebagai variabel penentu efektivitas operasional. Lebih lanjut, hal ini menjadi krusial karena adanya kesenjangan nyata antara tuntutan doktrinal OMSP dengan realitas logistik di Maluku. Dengan merumuskan strategi pergeseran yang berorientasi pada risiko, dan bertujuan untuk mentransformasi kondisi faktual yang hambatan-sentris menjadi kondisi ideal yang tangguh. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan data spasial, kapasitas logistik multimoda, dan sensitivitas sosial-budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kebijakan bagi pimpinan TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kepulauan yang strategis namun rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pergeseran satuan kecabangan Bekang TNI AD dalam rangka penugasan pengamanan daerah rawan Maluku,

sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam menganalisis rumusan masalah guna mencapai tujuan serta signifikansi penelitian. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut menghasilkan data deskriptif berupa fenomena sosial seperti motivasi, tindakan, perilaku, persepsi dari subjek penelitian. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara/interview langsung kepada informan yang berkompeten sesuai dengan penelitian yang akan dianalisis serta observasi dan studi dokumentasi, studi kepustakaan. Pedoman wawancara didasarkan pada pendekatan strategi Arthur F. Lykke, Jr., yang menyatakan bahwa strategi merupakan keseimbangan antara tiga komponen utama: Ends (tujuan yang ingin dicapai), Ways (konsep atau metode untuk mencapai tujuan), dan Means (sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan metode tersebut). Sedangkan, teknik analisis yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi dan Pola Kerawanan Keamanan di Wilayah Maluku

Pertama, Maluku merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau yang tersebar luas dengan konektivitas antar pulau yang terbatas. Karakteristik geografis ini menciptakan tantangan fundamental dalam pelaksanaan operasi keamanan. Pergeseran pasukan tidak dapat dilakukan semata-mata melalui jalur darat, melainkan sangat bergantung pada ketersediaan transportasi laut dan udara. Keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau adalah hambatan nyata dalam koordinasi respons keamanan. Isolasi geografis beberapa pulau menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan bantuan dan dukungan keamanan. Beberapa dampak operasional yang ditimbulkan: 1) Menyulitkan dan memperlambat mobilisasi pasukan dan logistic; 2) Memerlukan alutsista transportasi khusus (laut dan udara) yang tidak tersedia dalam jumlah cukup; dan 3) Meningkatkan kompleksitas perencanaan dan eksekusi operasi keamanan. Kedua, Keterbatasan transportasi adalah isu paling kritis. Ketersediaan kapal angkut militer (KRI/ADRI) dan pesawat angkut berat sangat terbatas dan harus berbagi dengan kebutuhan operasi di seluruh Indonesia. Ketergantungan pada kapal sewa sipil, meskipun menjadi alternatif, memunculkan masalah administratif yang birokratis dan ketersediaan yang tidak pasti. Waktu tunggu untuk mendapatkan kapal angkut dapat mencapai 24 hingga 72 jam, yang merupakan periode kritis dalam situasi darurat keamanan. Maka, dampak operasional yang ditimbulkan adalah 1) perpanjangan Lead Time (waktu tunggu) pergeseran pasukan secara signifikan; 2) Ketidakpastian dalam jadwal operasi yang dapat mengurangi efektivitas respons; dan 3) Ketergantungan tinggi pada alutsista transportasi sipil yang tidak dapat diandalkan sepenuhnya.

Ketiga, infrastruktur pangkalan, pelabuhan, dan gudang logistik di pulau-pulau terluar masih terbatas, baik dari segi kapasitas maupun kelengkapan. Pengiriman logistik dalam jumlah besar (akibat frekuensi pengiriman yang jarang) seringkali tidak dapat ditampung oleh gudang-gudang di pulau tujuan yang kapasitasnya terbatas. Fasilitas penyimpanan untuk material strategis masih jauh dari memadai. Hal ini memberikan dampak operasional, yakni: 1) Kesulitan dalam penumpukan logistik awal (prepositioning) untuk operasi jangka panjang; 2) Penurunan kapasitas dukungan operasi karena keterbatasan penyimpanan; dan 3) Dilema antara mengirim logistik dalam jumlah cukup atau menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan yang minim. Keempat, Cuaca di perairan Maluku (Laut Banda dan Laut Arafura) seringkali tidak dapat diprediksi dan dapat berubah ekstrem, menghambat jadwal pelayaran. Penundaan pelayaran akibat cuaca buruk bukan hanya menunda pergerakan personel, tetapi

juga menghambat distribusi material strategis seperti amunisi dan bahan bakar yang memerlukan standar keamanan angkut yang ketat. Variabilitas cuaca maritim adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol namun sangat berpengaruh terhadap operasi, yakni: 1) Penundaan jadwal pengiriman logistik strategis (amunisi, bahan bakar); 2) Material strategis tidak dapat diangkut dengan kapal komersial biasa, terbatas pada alutsista militer; dan 3) Ketidakpastian jadwal operasi yang berdampak pada perencanaan strategis.

Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ratusan pulau dapat diinterpretasikan sebagai faktor determinan utama yang membentuk pola kerawanan keamanan dan sekaligus menjadi kendala fundamental bagi respons keamanan konvensional. Data yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada transportasi laut dan udara, yang diperparah oleh keterbatasan alutsista dan infrastruktur, mengindikasikan bahwa model pergeseran pasukan yang masif dan terpusat dari Ambon tidak lagi relevan. Pola ini dapat diinterpretasikan sebagai kerentanan strategis, di mana negara hadir secara fisik melalui TNI, namun "terlambat" karena terhambat oleh faktor geografis dan logistik. Hal ini sejalan dengan penelitian Sitompul (2017) yang menekankan pentingnya mobilitas satuan dan penguasaan medan sebagai prasyarat keberhasilan OMSP di Indonesia Timur. Keterlambatan respons ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berdampak psikologis, menurunkan moril prajurit dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan akan pergeseran satuan bukan hanya untuk merespons konflik, tetapi untuk mengubah postur kehadiran negara dari yang reaktif menjadi proaktif dan preventif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pergeseran Satuan

Pertama, Koordinasi antar lembaga merupakan hambatan pertama dan paling fundamental dalam operasi pergeseran satuan. Terdapat forum koordinasi, namun implementasi sinergi dan integrasi data, terutama data intelijen, masih belum optimal. Tidak adanya perencanaan yang terpadu antara TNI, Polri, dan Pemda, menjadikan solusi yang ditawarkan seringkali hanya bersifat militeristik dan tidak menyentuh akar masalah sosial-ekonomi yang mungkin menjadi pemicu konflik. Dampak yang ditimbulkan adalah: 1) Perencanaan dan Intelijen: Operasi menjadi parsial dan tidak sinkron. Akar masalah sosial-ekonomi tidak tertangani secara komprehensif; 2) Koordinasi Operasional: Tumpang tindih pergerakan dan duplikasi upaya mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya; dan 3) Dukungan Pemda: Dukungan dari Pemerintah Daerah lambat dan birokratis, menghambat kelancaran operasi.

Kedua, Rantai pasok dan logistik adalah urat nadi dari setiap operasi militer. Di Maluku, urat nadi ini mengalami penyumbatan serius. Permasalahan tidak hanya pada ketersediaan kapal, tetapi juga pada regulasi keamanan untuk mengangkut material strategis dan kapasitas penyimpanan di tujuan. Siklus permasalahan utama dimulai dari kapal militer terbatas, sehingga pengiriman harus dalam jumlah besar, namun gudang di tujuan tidak mampu menampung, yang pada akhirnya kembali membatasi jumlah yang bisa dikirim. Ketergantungan pada transportasi laut menciptakan kerentanan terhadap gangguan cuaca dan ketidakpastian jadwal. Dimensi Dampak: 1) Transportasi Maritim: Keterbatasan kapal angkut militer dan ketergantungan pada kapal sewa sipil menciptakan ketidakpastian jadwal; 2) Regulasi Keamanan: Material strategis (amunisi, bahan bakar) memerlukan standar keamanan angkut yang ketat, membatasi pilihan moda transportasi; 3) Penyimpanan Logistik: Kapasitas gudang di pulau tujuan terbatas, menciptakan dilema antara jumlah pengiriman dan kapasitas penyimpanan. Dampak Operasional: 1) Keterlambatan pengiriman bekal dan material strategis; 2) Satuan tidak dapat bergerak dengan dukungan logistik yang memadai untuk operasi jangka panjang; dan 3) Efektivitas operasi berkurang karena keterbatasan sumber daya.

Ketiga, Infrastruktur dan *Staging* area adalah jawaban potensial untuk memotong siklus masalah logistik dan *Lead Time*. Konsep pangkalan aju di titik strategis diakui secara teoretis sebagai solusi ideal. Ketiadaan infrastruktur dan *staging area* saat ini membuat semua pergerakan harus ditarik dari pangkalan utama yang jauh. Kriteria pemilihan lokasi pangkalan aju tidak sederhana, harus mempertimbangkan aksesibilitas pelabuhan, ketersediaan sumber daya alam (air bersih), dan yang terpenting, penerimaan dari masyarakat lokal agar tidak menciptakan konflik baru. Lokasi strategis untuk pangkalan aju harus memenuhi kriteria teknis dan sosial yang ketat. Dimensi Dampak: 1) *Lead Time* Pergeseran: Semua pergerakan dimulai dari pangkalan utama di Ambon, menyebabkan waktu respons yang panjang; 2) Respons Cepat: Ketiadaan *Staging* area menghambat kemampuan untuk merespons ancaman dengan cepat di lokasi-lokasi terpencil; dan 3) Dukungan Logistik: Jarak yang jauh membuat dukungan logistik menjadi lebih kompleks dan mahal. Dampak Operasional: 1) *Lead Time* pergeseran pasukan tetap panjang karena semua pergerakan dimulai dari pangkalan utama; 2) Respons menjadi lambat terhadap ancaman keamanan yang muncul di lokasi-lokasi terpencil; dan 3) Efektivitas operasi berkurang karena ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat.

Keempat, Kerja Sama Sipil-Militer, khususnya dengan operator transportasi, adalah sebuah potensi yang belum tergarap optimal. Tanpa adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang jelas, semua permintaan bersifat mendadak dan mengganggu alur komersial. Koordinasi bersifat insidental dan transaksional. Data dari Pemda Maluku menunjukkan bahwa sebuah MoU yang mengatur *dedicated berth* (dermaga khusus), protokol komunikasi darurat, dan skema kompensasi akan mengubah hubungan dari yang semula bersifat transaksional-insidental menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Dimensi Dampak: 1) Regulasi dan Komunikasi: Belum ada MoU formal dengan operator transportasi sipil. Koordinasi bersifat insidental dan mendadak; 2) Dukungan Komersial: Ketiadaan kesepahaman formal menyebabkan operator sipil kurang responsif terhadap kebutuhan militer; dan 3) Efisiensi Operasional: Koordinasi yang tidak terstruktur menyebabkan kekacauan jadwal, penumpukan, dan potensi kerugian ekonomi. Dampak Operasional: 1) Timbulnya kekacauan jadwal di pelabuhan dan penumpukan yang tidak teratur; 2) Potensi kerugian ekonomi bagi pihak komersial mengurangi kemauan untuk berkooperasi; dan 3) Dukungan transportasi sipil tidak maksimal karena ketiadaan kesepahaman formal.

Kelima, Penerimaan Sosial dan Budaya adalah faktor kunci dalam perang modern yang mengutamakan pendekatan humanis (*winning hearts and minds*). Adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara satuan organik (putra daerah) yang lebih memahami adat dan bahasa, dengan satuan dari luar yang cenderung lebih kaku. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi dari keberhasilan operasi pengamanan jangka panjang. Dimensi Dampak: 1) Komunikasi dan Adaptasi: Ada "jarak" budaya antara prajurit non-putra daerah dengan masyarakat lokal. Persepsi satuan dari luar lebih kaku dan formal; 2) Pengumpulan Informasi: Kemampuan satuan untuk melakukan pendekatan humanis dan pengumpulan informasi dari masyarakat menjadi terbatas; dan 3) Kepercayaan Masyarakat: Kepercayaan butuh waktu lama untuk dibangun, menghambat efektivitas operasi intelijen dan pengamanan. Dampak Operasional: 1) Adanya "jarak" budaya mengurangi kemampuan satuan untuk melakukan pendekatan humanis; 2) Pengumpulan informasi dari masyarakat menjadi terbatas karena kurangnya kepercayaan; dan 3) Kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu lama untuk dibangun, menghambat efektivitas operasi jangka panjang.

Analisis terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pergeseran satuan menunjukkan adanya pertarungan antara kebutuhan operasional di lapangan dengan

kekakuan birokrasi dan keterbatasan sistemik. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk pergeseran yang cepat dan fleksibel. Di sisi lain, ada hambatan berupa koordinasi antar-lembaga yang parsial, rantai pasok yang rapuh, dan regulasi yang belum mendukung kerja sama sipil-militer secara optimal. Ini adalah cerminan dari apa yang disoroti oleh Wahyudi (2019), bahwa pergeseran pasukan bukan hanya soal taktik militer, tetapi juga soal manajemen operasi dan dukungan sistem logistik yang solid. Lemahnya koordinasi, seperti yang diungkapkan oleh Kasijasa Kodam XVI/Pattimura, dapat diinterpretasikan sebagai gejala dari ego sektoral yang masih kuat, di mana setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa sebuah kerangka kerja terpadu. Ketergantungan pada kapal sewa sipil yang bersifat ad-hoc dan transaksional, alih-alih kemitraan strategis, menunjukkan bahwa potensi sumber daya nasional belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menegaskan temuan Safitri (2021) tentang pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas wilayah.

Strategi Pergeseran Satuan Kecabangan Bekang TNI AD dalam Rangka Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Maluku

Model Pergeseran Gabungan. Model ini menggabungkan fleksibilitas dan kecepatan respons dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Perlu adanya pergeseran fundamental dari pola respons saat ini, sehingga secara teoritis dan *feasible*, dapat diimplementasikan dengan perencanaan yang matang. Analisis model pergeseran didasarkan pada 3 (tiga) standar utama, yakni: ENDS (tujuan akhir); WAYS (cara mencapai tujuan) dan MEANS (sumber daya yang dibutuhkan) ENDS (Tujuan Akhir). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah menciptakan kondisi aman yang berkelanjutan melalui pengamanan daerah rawan yang responsif, humanis, dan terintegrasi dengan solusi sosial-ekonomi. Ini berarti kondisi aman yang tidak hanya diciptakan oleh kehadiran aparat secara fisik, tetapi juga oleh adanya rasa aman di tengah masyarakat dan berjalannya roda sosial-ekonomi secara normal. Tujuan ini bersifat holistik dan melampaui sekadar penindakan konflik. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek keamanan, sosial, dan ekonomi adalah kunci untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Dampak Strategis: 1) Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan sosial-ekonomi; 2) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan; dan 3) Mengurangi akar penyebab konflik melalui solusi sosial-ekonomi yang terintegrasi. WAYS (Cara Mencapai Tujuan). Cara yang diusulkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui implementasi Model Pergeseran Gabungan, yang terdiri dari tiga pilar utama:

1. Pilar 1: Reaksi Cepat Berbasis Intelijen. Kemampuan untuk merespons ancaman dalam waktu singkat berdasarkan data intelijen akurat dan real-time, bukan lagi menunggu eskalasi kasat mata. Sistem intelijen yang terintegrasi, keputusan operasional dapat diambil lebih cepat dan lebih akurat. Integrasi data intelijen dari berbagai sumber (TNI, Polri, BIN, Pemda) dapat memberikan gambaran situasi yang lebih komprehensif dan memungkinkan respons yang lebih proaktif. Dampak Operasional: 1) Mengurangi waktu respons dari jam-jam menjadi menit-menit; 2) Meningkatkan akurasi analisis ancaman melalui integrasi data; dan 3) Memungkinkan pencegahan eskalasi konflik sebelum terjadi
2. Pilar 2: *Staging* di Pulau Strategis. Ini adalah jantung dari Model Pergeseran Gabungan. Dengan membangun pangkalan aju yang berfungsi sebagai "lompatan katak" di gugus-gugus pulau strategis, *Lead Time* dapat dipotong secara drastis. Satuan dan logistik awal sudah berada lebih dekat dengan potensi titik rawan. Konsep *Staging* ini bukan hanya tentang membangun fasilitas fisik, tetapi tentang menciptakan sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemilihan lokasi *Staging* area harus mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan penerimaan masyarakat. Dampak Operasional: 1) Memotong *Lead Time* pergeseran pasukan dari 24-72 jam menjadi

hitungan jam; 2) Meningkatkan kemampuan respons terhadap ancaman di lokasi-lokasi terpencil; dan 3) Memungkinkan penumpukan logistik awal (prepositioning) yang lebih efektif.

3. Pilar 3: Rotasi Satuan Berbasis Risiko. Menggantikan model rotasi reguler yang kaku dengan sistem rotasi yang dinamis. Penempatan dan penarikan satuan didasarkan pada analisis tingkat kerawanan suatu wilayah yang terus diperbarui, sehingga pengeralahan kekuatan menjadi lebih efisien. Rotasi berbasis risiko memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal. SSistem ini dapat mengurangi beban ekonomi dan sosial dari kehadiran satuan yang tidak perlu di daerah-daerah yang tingkat kerawannya rendah. Dampak Operasional: 1) Optimalisasi penggunaan sumber daya militer; 2) Pengurangan beban ekonomi dan sosial di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan rendah; dan 3) Peningkatan efisiensi operasi melalui alokasi yang berbasis data

MEANS (Sumber Daya yang Dibutuhkan). Untuk menjalankan cara-cara di atas, diperlukan tiga jenis sumber daya krusial yang harus dipenuhi:

1. Sumber Daya 1: Alutsista Transportasi Antar Pulau Dedikatif. Ketersediaan kapal angkut (minimal setingkat LCU - Landing Craft Utility) dan helikopter yang didedikasikan khusus untuk mendukung mobilitas di dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura, tanpa harus bergantung pada alokasi terpusat dari Mabes TNI AD. Alutsista transportasi yang dedikatif memungkinkan fleksibilitas operasional yang lebih tinggi. Jika memiliki alutsista sendiri, Kodam dapat merencanakan operasi tanpa harus menunggu persetujuan dari tingkat pusat. Spesifikasi Teknis: Kapal angkut minimal setingkat LCU dengan kapasitas 100-150 ton; Helikopter transport dengan jangkauan minimal 300 km; Sistem komunikasi yang terintegrasi dengan pangkalan aju. Dampak Operasional: Meningkatkan fleksibilitas operasional; Mengurangi ketergantungan pada alokasi terpusat; Memungkinkan operasi yang lebih cepat dan responsif.
2. Sumber Daya 2: Infrastruktur Pangkalan Aju Modern. Pembangunan fisik pangkalan aju yang tidak hanya berupa lahan kosong, tetapi dilengkapi dengan gudang modular, fasilitas akomodasi sementara, sumber air bersih, dan yang terpenting, sistem komunikasi yang andal. Infrastruktur pangkalan aju harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan penerimaan masyarakat. Verifikasi dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pangkalan aju yang dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal akan mendapat dukungan yang lebih kuat. Spesifikasi Teknis: Gudang dengan kapasitas 500-1000 ton; Fasilitas akomodasi untuk 200-300 prajurit; Sistem penyediaan air bersih yang sustainable; Sistem komunikasi satelit dan radio yang terintegrasi; Fasilitas kesehatan dasar dan logistic. Dampak Operasional: Memungkinkan penumpukan logistik awal yang lebih efektif; Meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan prajurit; Memfasilitasi operasi yang lebih panjang dan berkelanjutan
3. Sumber Daya 3: Sistem Informasi Intelijen Terintegrasi. Sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber (TNI, Polri, BIN, Pemda, bahkan laporan masyarakat) dan menyajikannya dalam bentuk analisis risiko yang mudah dibaca oleh pengambil keputusan. Integrasi data intelijen dari berbagai sumber dapat meningkatkan akurasi analisis ancaman. Sistem informasi yang terintegrasi juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar lembaga. Spesifikasi Teknis: Platform digital yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber; Dashboard analitik yang menampilkan tingkat risiko real-time; Sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi; Kemampuan untuk berbagi informasi dengan lembaga lain secara aman. Dampak Operasional: Meningkatkan akurasi analisis ancaman; Memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat; Memfasilitasi koordinasi antar lembaga yang lebih baik

Usulan strategi yang muncul dari hasil pengolahan data, seperti pembentukan pangkalan aju (*Staging area*), kontrak multi-tahun dengan operator transportasi, dan penggunaan data intelijen untuk pergeseran selektif, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk bertransformasi dari pendekatan berbasis kekuatan (*force-based*) menjadi pendekatan berbasis informasi (*information-based*) dan jejaring (*network-based*). Ini adalah sebuah pergeseran paradigma dari pengerahan pasukan secara masif menjadi pengerahan yang lebih kecil, lebih cerdas, dan lebih cepat. Gagasan ini sejalan dengan penelitian Yusran (2020) yang menemukan bahwa strategi pergeseran yang mengakomodasi karakteristik lokal dan berbasis pada sinergi lintas sektor terbukti efektif menekan eskalasi konflik. Pembentukan pangkalan aju, misalnya, bukan hanya solusi logistik, tetapi merupakan manifestasi fisik dari strategi desentralisasi komando dan pengendalian, yang memungkinkan respons cepat di titik-titik rawan. Usulan untuk adanya MoU dengan pihak sipil mengindikasikan adanya kesadaran untuk membangun sebuah ekosistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, tidak hanya militer. Dengan demikian, strategi yang efektif, efisien, dan adaptif adalah strategi yang mampu mengintegrasikan kekuatan militer dengan kecerdasan intelijen, kelincahan logistik, dan dukungan sosial dari masyarakat setempat.

Pembahasan

Kondisi dan Pola Kerawanan Keamanan di Wilayah Maluku

Kondisi keamanan di wilayah Maluku saat ini dicirikan oleh kompleksitas ancaman yang bersifat multidimensional. Barry Buzan (1991) menyatakan bahwa keamanan di wilayah kepulauan tidak hanya terbatas pada dimensi militer, tetapi mencakup integrasi antara dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Pola kerawanan di Maluku ditandai dengan potensi konflik sporadis yang dapat meletus sewaktu-waktu di wilayah-wilayah yang terfragmentasi secara geografis. Sejalan dengan Lewis A. Coser (1956) konflik sebagai perjuangan atas nilai dan sumber daya. Hambatan dalam manajemen konflik diakibatkan karakteristik geografis maritim. Berdasarkan segitiga konflik Johan Galtung (*contradiction, attitude, behavior*), keterlambatan respons terhadap eskalasi kekerasan akibat tantangan logistik dan infrastruktur memberikan ruang bagi pengerahan sikap negatif dan pendalaman kontradiksi antar-kelompok, yang pada akhirnya menyulitkan upaya transformasi konflik secara damai. Keterbatasan sarana dukungan (minimnya alutsista, transportasi laut-udara, infrastruktur pangkalan belum memadai) menciptakan pola respons cenderung reaktif dan masif. Adanya *lead time* (72 jam) hanya untuk mobilisasi pasukan ke titik kerawanan. Hal ini merepresentasikan ketidakselarasan antara *ends* (tujuan stabilitas), *ways* (metode operasi), dan *means* (sarana pendukung) (Lykke, 1989).

Pola respons reaktif yang dipaksakan oleh keterbatasan logistik dapat menghambat efektivitas militer, dan memberikan dampak psikologis serta penurunan moril prajurit (durasi tunggu panjang di titik embarkasi, yang mengancam kesiapsiagaan operasional). Kelelahan fisik dan mental sebelum tiba di daerah operasi berpotensi menurunkan kemampuan prajurit dalam menjalankan fungsi stabilisator dan katalisator di tengah masyarakat yang sensitif. Pola kerawanan sporadis dan tersebar dan model pergeseran pasukan terpusat dan masif sudah tidak lagi relevan, sehingga dibutuhkan desain strategi yang berbasis pada pendekatan dan terdesentralisasi, mengedepankan kecepatan reaksi tinggi dan mobilitas yang adaptif terhadap kondisi maritim yang dinamis dan dapat dilaksanakan secara proporsional, efisien, dan humanistik dalam menjaga stabilitas wilayah Maluku.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pergeseran Satuan

Terdapat 5 (lima) faktor dominan yang menentukan keberhasilan operasi, yakni: 1) koordinasi antar lembaga; 2) rantai pasok logistik; 3) infrastruktur; 4) kerja sama sipil-militer, dan 5) penerimaan sosial-budaya. Kelima faktor tersebut merupakan manifestasi dari tantangan dalam menyinergikan aspek-aspek OMSP, resolusi konflik, dan keamanan wilayah dalam satu kesatuan operasional. Dalam implementasinya, kelima faktor tersebut menghadapi permasalahan kompleks. *Pertama*, koordinasi antar lembaga yang terhambat oleh ego sektoral dan data intelijen yang tidak terintegrasi merupakan titik lemah paling fundamental. Maka, Burton (1990) menekankan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Lebih lanjut, Lykke menekankan keseimbangan *Ends-Ways-Means* guna mencapai stabilitas keamanan wilayah Maluku. *Selanjutnya*, rantai pasok logistik dan ketiadaan infrastruktur area pangkalan aju (*staging area*) yang memadai adalah representasi nyata dari kelemahan komponen sarana (*Means*), sehingga melumpuhkan kemampuan menjalankan metode (*Ways*) yang efektif. Ketidadaan pangkalan aju di gugus-gugus pulau strategis, membuat konsep reaksi cepat menjadi mustahil diimplementasikan. Infrastruktur terbatas menciptakan kerentanan pada dimensi logistik dan operasional. Pangkalan aju bukan sekadar fasilitas logistik, melainkan faktor pendukung strategis yang memungkinkan pergeseran dari postur reaktif menjadi proaktif.

Keempat, kerja sama sipil-militer masih bersifat insidental dan belum terlembagakan dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU), menunjukkan potensi sumber daya nasional yang belum termanfaatkan secara optimal. Pelibatan komponen sipil merupakan suatu keniscayaan, karena berkaitan dengan dimensi ekonomi dan sosial. MoU yang memungkinkan mobilisasi lebih terencana dan efisien, serta memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan penggunaan sarana (*Means*) yang ada di wilayah operasi, guna mendukung optimalisasi sumber daya. Buzan (1991) dalam *human security*, menempatkan individu dan masyarakat sebagai subjek utama perlindungan, faktor penerimaan sosial dan budaya menjadi penentu efektivitas pada level mikro, tetapi berdampak makro. Berdasarkan konsep OMSP, pendekatan humanis dan pembinaan teritorial serta memaksimalkan peran putra daerah merupakan bagian efektivitas operasi (kemampuan tempur dan kecerdasan budaya (*cultural intelligence*)). Berdasarkan teori resolusi konflik menekankan pentingnya pemahaman budaya dan pendekatan lokal. Essensi dari pendekatan tersebut adalah untuk merebut hati dan pikiran rakyat (*winning hearts and minds*). Galtung (2007) mengidentifikasi sikap (*attitude*) sebagai komponen penting dalam transformasi konflik, tanpa kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat, kemampuan satuan untuk melakukan pengumpulan informasi (Binter) akan tumpul, dan kehadiran mereka justru berpotensi memicu resistensi. Kegagalan dalam adaptasi budaya dapat mengubah kehadiran TNI dari agen resolusi konflik menjadi bagian dari masalah itu sendiri, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas operasi secara keseluruhan.

Berdasarkan teori keamanan wilayah yang mengakui dimensi sosial dan budaya, penerimaan sosial adalah fondasi bagi stabilitas jangka panjang. Tanpa dukungan masyarakat, keamanan wilayah hanya akan bersifat sementara dan bergantung pada kekuatan fisik semata. Berdasarkan konsep OMSP yang mengamanatkan sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dan institusi lainnya, pemahaman budaya lokal dan keterlibatan tokoh masyarakat menjadi jembatan komunikasi yang krusial untuk membangun kepercayaan, yang merupakan fondasi dari keberhasilan operasi pengamanan jangka panjang. Model pergeseran gabungan perlu didukung sarana (*Means*) yang memadai, yakni: 1) Sumber Daya 1: Alutsista Transportasi Khusus; 2) Sumber Daya 2: Infrastruktur Pangkalan Aju Modern; dan 3) Sumber Daya 3: Sistem Informasi Intelijen Terintegrasi. Secara keseluruhan, berdasarkan teori

strategi militer dari Lykke yang menekankan keseimbangan *Ends-Ways-Means*, strategi pergeseran gabungan ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang komprehensif. Strategi ini efektif karena dirancang untuk proaktif dan mengatasi akar masalah geografis, sejalan dengan prinsip adaptasi terhadap kondisi geografis dalam teori strategi militer. Strategi ini efisien karena mengalokasikan sumber daya secara dinamis dan mengurangi pemborosan akibat penantian dan birokrasi, sejalan dengan prinsip optimalisasi sarana (*Means*) dalam teori strategi. Selain itu, strategi ini adaptif karena mampu merespons dinamika ancaman yang cepat berubah di medan kepulauan yang kompleks, sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam OMSP.

Berdasarkan konsep OMSP yang mengintegrasikan aspek pertahanan, sosial, dan pembangunan, Model Pergeseran Gabungan mengintegrasikan ketiga dimensi ini dalam satu kerangka operasional yang kohesif. Berdasarkan teori resolusi konflik yang menekankan pentingnya transformasi konflik secara holistik, model ini dirancang untuk mengatasi tidak hanya manifestasi kekerasan, tetapi juga akar masalah sosial-ekonomi melalui kehadiran TNI yang berkelanjutan dan responsif. Berdasarkan teori keamanan wilayah yang mengakui multidimensionalitas keamanan, model ini mengintegrasikan dimensi militer, sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu strategi yang kohesif. Implementasi langkah-langkah prioritas yang diusulkan, seperti uji coba konsep (*proof of concept*) untuk pangkalan aju, akan menjadi langkah awal yang krusial untuk mewujudkan visi strategis ini. Berdasarkan konsep OMSP yang mengamatkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan, implementasi harus dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi strategi terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang.

Strategi Pergeseran Satuan Kecabangan Bekang TNI AD dalam Rangka Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Maluku

Model Pergeseran Gabungan merupakan strategi pergeseran satuan Bekang TNI AD yang mengombinasikan unsur kecepatan respons, kesiapan logistik, dan fleksibilitas penempatan pasukan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis Maluku yang berupa wilayah kepulauan. Model ini dirancang untuk menjadi solusi yang efektif, efisien, dan adaptif dengan menyelaraskan kembali komponen tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sarana (*Means*). Strategi ini secara sadar beranjak dari paradigma reaktif-masif menuju paradigma proaktif-modular. Model Pergeseran Gabungan adalah pola pergeseran satuan yang memadukan intelijen, dukungan logistik terdepan, dan sistem rotasi yang fleksibel untuk menghasilkan pergerakan pasukan yang lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan adaptif dalam mendukung pengamanan daerah rawan di Maluku. Model Pergeseran Gabungan mengusulkan tiga pilar pendekatan (*Ways*) yang secara langsung menjawab kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi:

1. Pilar 1: Reaksi Cepat Berbasis Intelijen (ancaman dapat dideteksi dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar).
2. Pilar 2: Area Pangkalan Aju di Pulau Strategis (penyimpanan personel dan perlengkapan, sehingga waktu pergeseran menjadi lebih singkat)
3. Pilar 3: Rotasi Satuan Berbasis Risiko (berdasarkan tingkat kerawanan wilayah. Daerah yang lebih rawan mendapat prioritas kekuatan yang lebih besar, dan sebaliknya)

Implementasi strategi ini dilaksanakan secara bertahap melalui langkah-langkah prioritas sebagai berikut:

Tabel 1. Konsep dan Uji Coba Prototype Pangkalan Aju (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 1: Konsep dan Uji Coba Prototype Pangkalan Aju

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Membuktikan kelayakan dan efektivitas model <i>Staging</i> dalam memangkas <i>Lead Time</i>
Lokasi	Satu lokasi paling strategis (misalnya, gugus pulau Seram atau Buru)
Penanggung Jawab	Kodam XVI/Pattimura dan Mabes TNI AD
Durasi	6-12 bulan
Indikator Keberhasilan	Pengurangan <i>Lead Time</i> minimal 50%, peningkatan respons operasional

Uji coba ini melibatkan semua *stakeholder*, termasuk Pemda dan masyarakat lokal, guna memastikan penerimaan dan keberlanjutan. Transparansi proses uji coba dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tabel 2. Peta Rantai Pasok Sipil dan Negosiasi MoU (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 2: Petakan Rantai Pasok Sipil dan Negosiasi MoU

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Menciptakan kapasitas transportasi sipil yang dapat diandalkan dan responsif
Aktivitas	Pemetaan operator transportasi sipil, negosiasi MoU, penetapan dedicated berth
Penanggung Jawab	UPP Kelas II Seram, Kodam XVI/Pattimura, Pemda Maluku
Durasi	3-6 bulan
Indikator Keberhasilan	Tersedianya MoU formal, peningkatan keandalan transportasi sipil

Negosiasi dengan operator sipil harus mempertimbangkan kepentingan komersial. Artinya, verifikasi dengan asosiasi pengusaha transportasi merupakan upaya konfirmasi skema kompensasi secara adil, sehingga dapat meningkatkan kooperatif.

Tabel 3. Pengembangan Sistem Informasi Intelijen Terintegrasi (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 3: Pengembangan Sistem Informasi Intelijen Terintegrasi

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Menciptakan platform digital yang mengintegrasikan data intelijen dari berbagai sumber
Aktivitas	Desain sistem, pengadaan teknologi, pelatihan pengguna, integrasi dengan sistem lain
Penanggung Jawab	Kodam XVI/Pattimura, BIN, Pemda Maluku
Durasi	12-18 bulan
Indikator Keberhasilan	Sistem operasional, peningkatan akurasi analisis ancaman, respons lebih cepat

Keamanan data adalah prioritas utama dalam pengembangan sistem ini, sedangkan verifikasi dilakukan guna mengukur kemampuan teknis lembaga lokal.

Tabel 4. Pembangunan Pangkalan Aju Permanen (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 4: Pembangunan Pangkalan Aju Permanen

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Membangun infrastruktur pangkalan aju yang permanen dan modern
Aktivitas	Pemilihan lokasi, desain, konstruksi, penyediaan fasilitas
Penanggung Jawab	Kodam XVI/Pattimura, Mabes TNI AD, Pemda Maluku
Durasi	24-36 bulan
Indikator Keberhasilan	Pangkalan aju operasional, peningkatan kapasitas logistik dan respons

Pembangunan pangkalan aju harus melibatkan masyarakat lokal dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk keberlanjutan.

Tabel 5. Pengadaan Alutsista Transportasi Dedikatif (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 5: Pengadaan Alutsista Transportasi Dedikatif

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Menyediakan alutsista transportasi yang dedikatif untuk mobilitas di Maluku
Aktivitas	Studi kelayakan, pengadaan kapal dan helikopter, pelatihan personel
Penanggung Jawab	Mabes TNI AD, Kodam XVI/Pattimura
Durasi	24-48 bulan
Indikator Keberhasilan	Alutsista operasional, peningkatan fleksibilitas operasional

Pengadaan alutsista harus mempertimbangkan kebutuhan operasional jangka panjang dan keberlanjutan pemeliharaan.

Tabel 6. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (diolah Peneliti)
Langkah Prioritas 6: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Meningkatkan kapasitas SDM dalam operasi hibrida dan adaptasi budaya
Aktivitas	Pelatihan operasional, pelatihan budaya, pelatihan sistem informasi
Penanggung Jawab	Kodam XVI/Pattimura, Lembaga Pendidikan TNI
Durasi	Berkelanjutan (setiap tahun)
Indikator Keberhasilan	Peningkatan kompetensi personel, peningkatan efektivitas operasi

Pelatihan budaya dan adaptasi sosial adalah aspek penting yang sering diabaikan, sehingga investasi dalam pengembangan SDM akan meningkatkan efektivitas operasi jangka panjang. Implementasi strategi ini harus dilakukan secara bertahap melalui enam langkah prioritas yang konkret dan dapat dieksekusi. Setiap langkah dirancang untuk dapat memberikan hasil yang terukur dan dapat dievaluasi, sehingga memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi dan Pola Kerawanan Keamanan di Wilayah Maluku Saat Ini. Kondisi fragmentasi geografis Maluku menciptakan tantangan inheren yang mengakibatkan pola kerawanan multi-dimensional, yang diperburuk keterbatasan infrastruktur logistik dan konektivitas antar pulau. Kondisi ini memicu paradoks strategis bagi TNI AD dalam menjaga stabilitas dengan tindakan pro-aktif, namun seringkali realitas lapangan memaksa respons bersifat reaktif. Lebih lanjut, efektivitas pengamanan wilayah kepulauan sangat bergantung pada kecepatan mobilitas pasukan. Namun, luas wilayah laut (92% dari total luas wilayah Maluku) menempatkan tantangan logistik sebagai hambatan utama, dengan indeks konektivitas antar pulau, yang membatasi pergerakan satuan saat terjadi eskalasi konflik (disparitas signifikan). Suryohadiprojo (2012) mengatakan bahwa keterlambatan respons logistik bukan sekadar kendala teknis, melainkan variabel penentu eskalasi konflik yang dapat merusak legitimasi kehadiran aparat di mata masyarakat lokal. Respons reaktif-masif, selama ini menjadi pola pergeseran satuan, dinilai kurang relevan dengan prinsip OMSP (pendekatan *flexible*, *adaptive*, dan *humanis*). Pola respons ini memiliki implikasi ganda. *Pertama*, keterlambatan pergeseran pasukan ke pulau-pulau terpencil memperbesar risiko eskalasi konflik horizontal. *Kedua*, adanya dampak psikologis terhadap prajurit. Penantian panjang dalam proses konsolidasi dan mobilisasi logistik yang tidak efisien berpotensi menurunkan moril dan tingkat kesiapsiagaan operasional. Keadaan ini menciptakan diskoneksi antara tujuan strategis stabilitas nasional dan kemampuan taktis di lapangan.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pergeseran Satuan Kecabangan Bekang TNI AD di Daerah Rawan Maluku. Efektivitas pergeseran satuan kecabangan Perbekalan dan Angkutan (Bekang) TNI AD dalam mendukung pengamanan daerah rawan di Maluku merupakan variabel krusial bagi stabilitas wilayah. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, namun pada determinasi lima faktor strategis: 1) koordinasi antarlembaga; 2) manajemen rantai pasok logistik; 3) ketersediaan infrastruktur; 4) mekanisme kerja sama sipil-militer, dan 5) penerimaan sosial-budaya masyarakat setempat.
3. Strategi Pergeseran Satuan Kecabangan Bekang TNI AD dalam Rangka Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Maluku. "Model Pergeseran Gabungan" menjadi strategi pergeseran satuan kecabangan Bekang TNI AD yang efektif, efisien, dan adaptif, dengan mengintegrasikan unsur intelijen, dukungan logistik, dan pengelolaan kekuatan secara terpadu guna meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas operasi pengamanan daerah rawan. Paradigma pergeseran satuan bergeser dari pola yang bersifat reaktif dan terpusat menuju pola yang proaktif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) standar, yakni: 1) Tujuan utama (*Ends*) adalah mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di wilayah Maluku, kehadiran satuan TNI AD tidak hanya berfungsi untuk menangani gangguan keamanan yang telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah potensi konflik sejak dini; 2) Metode pencapaian (*Ways*) terdiri atas reaksi cepat berbasis intelijen, pembangunan pangkalan aju pada pulau-pulau strategis, dan rotasi satuan berbasis risiko. Keberhasilan "Model Pergeseran Gabungan" memerlukan dukungan sarana dan sumber daya (*Means*) yang memadai, meliputi ketersediaan alutsista transportasi khusus seperti kapal angkut dan helikopter untuk mendukung mobilitas antarpulau, pembangunan infrastruktur pangkalan aju yang modern dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem informasi intelijen terintegrasi yang mampu menghubungkan data dari TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, S. (2012). Religious landscapes and segregation in Ambon City, Maluku. *Journal of East Asian Studies*, 12(3), 435–463.
- Andaya, L. Y. (1993). *The world of Maluku: Eastern Indonesia in the early modern period*. University of Hawaii Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2020). *Strategi penanggulangan terorisme nasional 2020–2024*. BNPT.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020*. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2023). *Provinsi Maluku dalam angka 2023*. BPS Provinsi Maluku.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management* (5th ed.). Pearson Education.
- Christopher, M., & Peck, H. (2004). *Logistics and supply chain management: Strategies for reducing cost and improving service*. Financial Times Prentice Hall.
- Clausewitz, C. von. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832).
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.
- Department of Defense. (2013). *Defense logistics management standards*. Assistant Secretary of Defense for Logistics and Materiel Readiness.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2019). *Manajemen strategis sektor publik*. Rajawali Pers.

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (12th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, K. (2020). *Psikologi pertahanan: Membangun karakter dan mentalitas bangsa*. Unhan Press.
- Jati, I. (2015). Strategi pertahanan kepulauan: Tantangan geografis dan mobilitas kekuatan TNI. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3).
- Joint Chiefs of Staff. (2023). *Joint publication (JP) 3-35: Deployment and redeployment operations*. U.S. Department of Defense.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2019). *Pemanfaatan wilayah kelautan dan tantangan keamanan di kawasan Timur Indonesia*. Lemhannas RI.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy. *Military Review*, 69(5), 2–8.
- Lykke, A. F. (1997). Toward an understanding of military strategy. In J. R. Cerami & J. F. Holcomb Jr. (Eds.), *U.S. Army War College guide to strategy*. Strategic Studies Institute.
- Markas Besar Angkatan Darat. (2020). *Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018)*. Mabesad.
- Muthahhari, A. (2021). Pendekatan teritorial TNI AD dalam menangani konflik sosial di wilayah perbatasan. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 7(2), 115–130.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013–2033.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Strategi Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.
- Pramono, B. (2019). Fleksibilitas penempatan pasukan dalam menghadapi ancaman asimetris. *Jurnal Strategi Pertahanan Nasional*, 5(2), 99–115.
- Pusat Sejarah TNI. (2020). *Sejarah Kodam XVI/Pattimura*. Pusjarah TNI.
- Rahakbauw, N. (2020). Tantangan peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia di wilayah kepulauan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 115–128.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soenarko, A. (2018). Peran strategi pertahanan dalam menjaga keutuhan NKRI. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(1), 55–70.
- Suharyo, D. (2022). *Strategi operasi militer TNI AD di wilayah Timur Indonesia*. CV Cipta Mandiri.
- Suryosubroto, B. (2017). *Ilmu strategi militer: Teori dan aplikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taufiq, M. (2019). Peran TNI dalam penanganan konflik komunal di Maluku. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 45–62.
- Van Creveld, M. (1977). *Supplying war: Logistics from Wallenstein to Patton*. Cambridge University Press.
- Van Klinken, G. (2007). *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. Routledge.
- Widodo, S. (2020). Strategi penempatan pasukan TNI dalam menghadapi konflik horizontal di Maluku. *Jurnal Kajian Keamanan Nasional*, 4(1), 25–38.
- Yani, A. (2023). *Konflik sosial dan strategi keamanan wilayah di Indonesia Timur*. Penerbit Amanah.